

5 Tahun Bui untuk Nurdin Abdullah



Nurdin Abdullah (tengah).

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi Makassar menjatuhkan vonis 5 tahun penjara plus denda Rp 500 juta kepada Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif, Nurdin Abdullah, Senin, 29 November lalu. Ia terbukti menerima suap dari bos PT Agung Perdana Bulukamba, Agung Sucipto, senilai Sin\$ 350 ribu dan Rp 8 miliar.

Uang tersebut untuk pendanaan partai dalam pemilihan kepala daerah. Nurdin diketahui membalas jasa kepada Agung dengan memberikan sejumlah proyek infrastruktur selepas terpilih sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Satu di antaranya paket pekerjaan jalan ruas Palampang-Munte-Botolempangan.

Hakim mencabut hak Nurdin untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun. "Terhitung sejak terdakwa selesai menjalani masa hukuman," ujar ketua majelis hakim Ibrahim Palino.

Kekayaan Pimpinan KPK Meningkat

MANTAN juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, mempertanyakan peningkatan harta kekayaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 2021 menyebutkan kekayaan Ghufron sebesar Rp 13,48 miliar, naik Rp 4,25 miliar dari 2019.

"Ada baiknya pimpinan KPK menjelaskan asal-usul kekayaan tersebut," ujarnya, Kamis, 2 Desember lalu. Ghufron baru saja membeli rumah mewah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, yang pernah dilelang Rp 4,5 miliar.

Ghufron mengklaim kenaikan harta berasal dari usaha pribadinya, yakni jual-beli properti. Banyak aset tanah dan bangunan dibelinya dari lelang negara. "Biasanya terhadap obyek yang sudah lelang ketiga harga pembeliannya relatif murah," kata Ghufron, yang juga memiliki usaha 70 kamar kos dan kolam renang seluas 1 hektare.



Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kiri) memberikan keterangan di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, Juni 2021.

Sengketa di Natuna Utara

S ENGKETA antara Indonesia dan Cina di perairan Natuna, Kepulauan Riau, kembali memanas. Pemerintah Cina dikabarkan melayangkan protes mengenai eksplorasi minyak dan gas alam di Laut Natuna Utara. "Komunikasi diplomatik penyelesaian masalah itu kami lakukan secara tertutup," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, Kamis, 2 Desember lalu.

Pengeboran minyak diklaim Cina berada dalam sembilan garis putus-putus. Garis imajiner itu membentuk huruf U yang bersisian dengan perairan Vietnam, Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS, wilayah yang dipersoalkan Cina dimiliki oleh Indonesia.

Teuku Faizasyah menilai proses *drilling* dan pengelolaan kawasan itu dengan sendirinya menunjukkan daerah tersebut merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Kedutaan Besar Cina tidak menanggapi permintaan konfirmasi yang dilayangkan *Tempo*.

Cina juga melayangkan nota diplomatik secara terpisah untuk memprotes latihan militer bertajuk Garuda Shield yang berlangsung di Laut Natuna Utara pada Agustus lalu. Latihan militer ini melibatkan 4.500-an tentara Indonesia dan Amerika Serikat.

Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Syaifullah Tamliha, mengatakan pemerintah harus menjelaskan kepada Cina bahwa wilayah itu merupakan bagian dari Indonesia. "Sebagai negara berdaulat, kita harus tegas menyatakan bahwa Natuna adalah wilayah Indonesia," katanya.

Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Julius Wiratno mengatakan kapal penjaga pantai Cina beberapa kali terlihat di sekitar area pengeboran dua sumur deliniasi Singa Laut-2 dan Kuda Laut-2 di Blok Tuna, area selatan Laut Natuna. "Tapi aktivitas tak terganggu karena ada pengamanan TNI AL," ucap Julius.